



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

3655/ka/xii/08,
968/DH-PPU/xii/08
02/PPU-IT/109.

Jakarta, 17 Desember 2008

Nomor : B.956/Setkab/Dep-Hkm/XII/2008
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Penyampaian Salinan Peraturan
Presiden Nomor 73 Tahun 2008

Kepada Yth.

1. Menteri Komunikasi dan Informatika
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Sekretaris Negara
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara
6. Ketua Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia

di
Jakarta

Bersama ini dengan hormat, kami sampaikan salinan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2008 tentang Penghasilan Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia, yang telah ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2008.

Demikian untuk mohon menjadikan maklum.



Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Kabinet;
2. Wakil Sekretaris Kabinet.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2008
TENTANG
PENGHASILAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia telah diberikan penghasilan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2007;
 - b. bahwa selain penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2007 kepada Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia juga menerima penghasilan lain yang bersumber dari jasa siaran dan non siaran;
 - c. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan transparansi dalam pemberian penghasilan kepada Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia, dipandang perlu mengatur kembali penghasilan bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia dengan Peraturan Presiden;

- Mengingat** :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

3. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGHASILAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
2. Penghasilan Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia adalah pendapatan yang diberikan dalam bentuk uang kepada Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Kepada Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia diberikan penghasilan setiap bulan.

(2) Penghasilan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Gaji Pokok;
- b. Tunjangan.

(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :

- a. Tunjangan Jabatan;
- b. Tunjangan Kesehatan;
- c. Tunjangan Perumahan;
- d. Tunjangan Transportasi; dan
- e. Tunjangan Hari Tua.

Pasal 3

(1) Besarnya penghasilan Ketua Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia adalah sebesar Rp. 25.000.000,00 (Duapuluh Lima Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Gaji Pokok : Rp. 2.500.000,00
- b. Tunjangan Jabatan : Rp. 5.500.000,00
- c. Tunjangan Kesehatan : Rp. 3.000.000,00
- d. Tunjangan Perumahan : Rp. 5.500.000,00
- e. Tunjangan Transportasi : Rp. 5.000.000,00
- f. Tunjangan Hari Tua : Rp. 3.500.000,00

(2) Besarnya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Besarnya penghasilan Anggota Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia adalah sebesar Rp. 22.000.000,00 (Duapuluh Dua Juta Rupiah) dengan perincian penghasilan sebagai berikut :
- a. Gaji Pokok : Rp. 2.500.000,00
 - b. Tunjangan Jabatan : Rp. 4.500.000,00
 - c. Tunjangan Kesehatan : Rp. 2.500.000,00
 - d. Tunjangan Perumahan : Rp. 5.000.000,00
 - e. Tunjangan Transportasi : Rp. 5.000.000,00
 - f. Tunjangan Hari Tua : Rp. 2.500.000,00
- (3) Penghasilan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 4

Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia tidak berhak memperoleh penghasilan tetap lainnya selain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, diberikan sejak yang bersangkutan dikukuhkan sebagai Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia.

Pasal 6 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6

Besaran panjar penghasilan yang telah diterima oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia yang bersumber dari Jasa Siaran/Non Siaran diperhitungkan dengan besaran penghasilan berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 7

Pajak Penghasilan atas pemberian Gaji dan Tunjangan bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia ditanggung oleh Pemerintah.

Pasal 8

Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia yang berhenti atau berakhir masa jabatannya tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2007 tentang Penghasilan Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 11

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Desember 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,



Dr. M. Imran Santoso